

**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KETIDAKHARMONISAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

(Studi di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh

Erica Putri Hermala



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

ABSTRACT

COMMUNITY ATTITUDE TOWARDS THE DISHARMONY BETWEEN MAYOR AND VICE MAYOR OF BANDAR LAMPUNG CITY

By

Erica Putri Hermala

Herman HN and M. Yusuf Kohar are the Mayor and Vice Mayor of Bandar Lampung city for the period of 2016-2021. In leading the region, Herman HN and M. Yusuf Kohar are proven disharmony. Therefore, the research aims at determining the attitude of community toward the disharmony relation between mayor and vice mayor of Bandar Lampung city. Attitude of community, in this case, is measured from three domain i.e., cognitive, affective, and conative. This research uses quantitative descriptive methods. The results showed that 67% of respondents knew (cognitive aspects) the disharmony between the Mayor and Vice Mayor of Bandar Lampung, 100% of respondents disagreed (affective aspect) of disharmony between the Mayor and Vice Mayor of Bandar Lampung, and 74% of respondents still supported (conative aspects) of government despite the disharmony between the Mayor and Vice Mayor of Bandar Lampung.

Keywords: Disharmony, Community, Attitude.

ABSTRAK

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KETIDAKHARMONISAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

(Studi di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

Oleh

Erica Putri Hermala

Herman HN dan M. Yusuf Kohar adalah pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung periode 2016-2021. Herman HN dan Muhammad Yusuf Kohar dalam memimpin daerah terbukti tidak bersinergi dengan baik atau terjadi ketidakharmonisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung. Sikap masyarakat tersebut dilihat dari tiga komponen; kognitif, afektif, dan konatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 67% responden mengetahui (aspek kognitif) ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, 100% responden tidak setuju (aspek afektif) terhadap ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, dan 74% responden tetap mendukung (aspek konatif) pemerintahan walaupun terjadi ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Ketidakharmonisan, Masyarakat, Sikap.

**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KETIDAKHARMONISAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

(Studi di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

**Oleh:
Erica Putri Hermala**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **Sikap Masyarakat terhadap Ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Studi di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)**

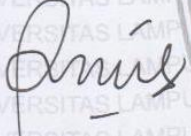
Nama Mahasiswa : **Erica Putri Hermala**

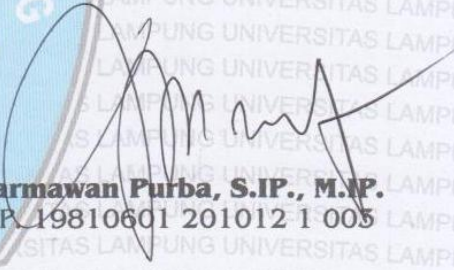
Nomor Pokok Mahasiswa : **1516021080**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001


Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP. 19810601 201012 1 005

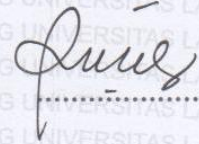
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

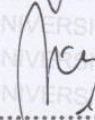
Ketua : Dr. Feni Rosalia, M.Si.



Sekretaris : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.



Penguji : Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Agustus 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2019



Yang Membuat Pernyataan

Erica Putri Hermala
NPM. 1516021080

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Erica Putri Hermala. Lahir di Metro pada tanggal 25 Januari 1997 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Suwarto Effendi dan Ibu Partiyah. Pendidikan formal yang penulis tempuh dimulai dari Sekolah Dasar di SD N 2 Banar Joyo tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Batang Hari tahun 2009 dan lulus di tahun 2012. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Kota Metro pada tahun 2012 dan lulus di tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur masuk SBMPTN. Penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN) pada bulan Januari tahun 2018 di Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan suatu urusan). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.”
(Q.S Al Insyirah : 5-8)

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses.
Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti”
(Emha Ainun Nadjib)

*“Everyday is a race.
The last but not least”
(Anonymous)*

Setiap orang memiliki porsinya masing-masing.
Tetap berusaha dan berdoa.
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahin

Alhamdulillahirabbil'amaliin kupakanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayah, Ibu, Kakak serta Adikku tersayang sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.
Terima kasih atas segala doa dan restu yang telah kalian berikan.

Terima kasih untuk keluarga besar Jurusan Ilmu Pemerintahan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan berkah bagi kita semua

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sikap Masyarakat terhadap Ketidakharmisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Studi di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini antara lain yaitu:

1. Ayah dan Ibu, kakakku Rudi Alfianto serta adikku Cantika Selawidya Sari tercinta yang penulis banggakan, sayangi dan cintai, terima kasih atas segala doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang tidak mampu penulis balas segala jasa, kebaikan, dan ketulusannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan dari Ayah, Ibu, kakak dan adikku.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro , M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang selalu memberi motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis, serta meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan juga memberikan banyak sekali masukan, kritik, serta saran yang ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga atas kebaikan dan pengertian terhadap penulis yang telah ibu berikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada ibu di manapun ibu berada.
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis terlebih lagi meluangkan banyak waktu, tenaga maupun pikiran dalam memberikan banyak masukan guna terciptanya skripsi ini. Terima kasih juga atas kebaikan dan juga pengertian terhadap penulis yang telah bapak berikan, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada bapak di manapun bapak berada.
6. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran yang sangat membangun bagi penulis. Terima kasih kepada bapak karena telah memberikan banyak kontribusi dalam perbaikan skripsi agar menjadi lebih baik dan terstruktur. Masukan dan saran yang bapak berikan sangat bermanfaat dalam penyusunan

skripsi ini. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah kepada bapak di manapun bapak berada.

7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah kepada bapak dan ibu di manapun berada.
8. Seluruh informan penulis, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu di dunia dan akhirat.
9. Terima kasih untuk Tesar Santuri yang selalu menemani penulis kapanpun dan di manapun, yang sangat berkontribusi dari awal pembuatan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih untuk segala bantuan, motivasi dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan.
10. Teruntuk sahabat dalam segala kondisi Erin Cahya Fadillia, Elsa Nanda Arvina, Mega Putri Antika, Adlu Hakan Ramadhan dan Muhammad Yusuf Amran. Terima kasih atas segala waktu, kenangan, kasih sayang, bantuan, motivasi dan keceriaan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menemani penulis selama ini dan selalu siap siaga ketika penulis membutuhkan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kesehatan di manapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam mencapai impian kita dan semoga hubungan baik ini tetap terjaga sampai kapanpun.

11. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan terutama Meisandra Annisa Almega, Sherly Meiriza Putri, Dina Mei Fitriana dan Sekar Arum Maheswari. Serta Tita, Hadian, Aji, Alvin, Diska, Acel, April, Ismi, Amel, Novita, Sari, Indah, Santini dan seluruh angkatan 15 yang lainnya. Terima kasih telah menemani masa perkuliahan penulis dan segala canda tawa, dukungan serta motivasi yang diberikan satu sama lain. Semoga kita semua dipertemukan dalam kesuksesan.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019

Penulis

Erica Putri Hermala

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Sikap Masyarakat.....	15
1. Pengertian Sikap.....	15
2. Teori Sikap.....	16
3. Fungsi Sikap.....	21
4. Komponen Sikap.....	22
5. Karakteristik Sikap.....	23
6. Proses Pembentukan dan Perubahan Sikap.....	25
7. Pengertian Masyarakat.....	26
B. Tinjauan Tentang Keharmonisan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	28
1. Pengertian Keharmonisan.....	28
2. Keharmonisan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah...	29
3. Faktor Penghambat Keharmonisan.....	31
C. Tinjauan Tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...	32
1. Kepala Daerah.....	32
2. Wakil Kepala Daerah.....	36
D. Sikap Masyarakat terhadap Ketidakarmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	38
E. Kerangka Pikir.....	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	43

1. Definisi Konseptual.....	43
2. Definisi Operasional.....	46
D. Populasi dan Sampel.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Pengolahan Data.....	52
1. Penyuntingan	52
2. Pengkodean.....	52
3. Tabulasi Data.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	54
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Kota Bandar Lampung.....	56
B. Kecamatan Kemiling.....	60
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil.....	63
1. Identitas Responden.....	64
2. Sikap Masyarakat terhadap Ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung	66
B. Pembahasan.....	103
1. Sikap Kognitif.....	110
2. Sikap Afektif.....	112
3. Sikap Konatif.....	113
VI. PENUTUP	
A. Simpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Pecah Kongsy” antara tahun 2005-2013.....	5
2. Data Pribadi Herman HN dan Yusuf Kohar.....	8
3. Definisi Operasional.....	46
4. Jumlah Penduduk Kecamatan Kemiling.....	48
5. Jumlah Sampel Kecamatan Kemiling.....	49
6. Nilai/skor untuk Berdasarkan Kategori Jawaban.....	51
7. Skor Nilai untuk Kategori Sikap.....	54
8. Jumlah Penduduk Perkecamatan di Kota Bandar Lampung.....	57
9. Sejarah Wali Kota Bandar Lampung.....	59
10. Jumlah Penduduk Perkelurahan di Kecamatan Kemiling.....	62
11. Identitas Responden menurut Jenis Kelamin.....	64
12. Identitas Responden menurut Usia.....	65
13. Identitas Responden menurut Jenis Pekerjaan.....	66
14. Pengetahuan Masyarakat tentang Perselisihan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.....	67
15. Pengetahuan Masyarakat tentang Wakil Wali Kota berasal dari Kalangan Pengusaha.....	68
16. Pengetahuan Masyarakat tentang Wali Kota berkata telah salah memilih Wakil.....	69
17. Pengetahuan Masyarakat tentang Komunikasi kurang berjalan baik antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.....	69
18. Pengetahuan Masyarakat tentang Wakil Wali Kota tidak melaksanakan Tugas yang diberi oleh Wali Kota.....	70

19. Pengetahuan Masyarakat tentang Wakil Wali Kota berkata tidak mendapatkan tugas dari Wali Kota.....	71
20. Persentase Jawaban Aspek Kognitif Responden.....	73
21. Interval Aspek Kognitif Responden.....	75
22. Persetujuan Masyarakat tentang Wali Kota dan Wakil Wali Kota saling menyalahkan satu sama lain.....	77
23. Persetujuan Masyarakat tentang Wali Kota dan Wakil Wali Kota kurang menjaga keharmonisan sebagai pasangan pemimpin.....	78
24. Persetujuan Masyarakat tentang Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak kompak sebagai pasangan pemimpin.....	79
25. Persetujuan Masyarakat tentang Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengutamakan keinginannya masing-masing.....	80
26. Persetujuan Masyarakat tentang Wali Kota terlalu dominan dalam pengambilan keputusan.....	81
27. Persetujuan Masyarakat tentang Wakil Wali Kota melaksanakan tugas yang sama dengan Wali Kota.....	82
28. Persentase Jawaban Aspek Afektif Responden.....	84
29. Interval Aspek Afektif Responden.....	86
30. Perilaku Masyarakat Tetap Mendukung Pemerintahan walaupun terjadi Ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota	88
31. Perilaku Masyarakat Tidak Mendukung Pemerintahan jika terjadi Ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.....	89
32. Perilaku Masyarakat Ikut Berpartisipasi dalam Program Pemerintah walaupun terjadi Ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.....	90
33. Perilaku Masyarakat Tidak Ikut Berpartisipasi dalam Program Pemerintah jika terjadi Ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.....	91
34. Perilaku Masyarakat Tidak Percaya kepada Pemerintah karena terjadi Ketidakharmonisan.....	92

35. Perilaku Masyarakat Tetap Percaya kepada Pemerintah walaupun terjadi Ketidakharmonisan.....	93
36. Perilaku Masyarakat Puas dengan Pelayanan Pemerintah walaupun terjadi Ketidakharmonisan.....	94
37. Perilaku Masyarakat Tidak Puas dengan Pelayanan Pemerintah karena terjadi Ketidakharmonisan.....	95
38. Persentase Jawaban Aspek Konatif Responden.....	97
39. Interval Aspek Konatif Responden.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	41
2. Peta Kota Bandar Lampung.....	56
3. Peta Kecamatan Kemiling.....	60
4. Hasil Aspek Kognitif Responden.....	76
5. Hasil Aspek Afektif Responden.....	87
6. Hasil Aspek Konatif Responden.....	100
7. Program Pemkot Bandar Lampung Herman HN tanpa Yusuf Kohar	107

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepala Daerah merupakan seseorang yang diberi amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Kepala Daerah sebuah provinsi disebut dengan Gubernur, untuk sebuah kota kepala daerahnya disebut dengan Wali Kota dan untuk sebuah kabupaten disebut dengan Bupati. Setiap daerah terdapat satu pemimpin atau Kepala Daerah dan dibantu satu orang wakilnya.

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis yaitu dapat dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah atau dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pengisian keanggotaannya melalui Pemilihan Umum Legislatif, sedangkan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota sebagai Wakil Kepala Daerah dalam UUD 1945 tidak diatur, oleh karena itu pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta pengisian dan pemberhentian jabatan Wakil Kepala Daerah diserahkan kepada Undang-Undang.

Pemimpin daerah selain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan *political recruitment* atau model pemilihan (*elections*) yang bersifat langsung (*direct*) dan menjalankan amanah rakyat. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diibaratkan sebagai pasangan yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal pengelola maupun pemegang kuasa kepemimpinan di daerah.

Tugas utama seorang Kepala Daerah adalah memimpin dan bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan segala sesuatu hal yang berjalan di daerah. Seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus mampu bersinergi dan harmonis dalam hal berpikir, bertindak dan bersikap mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat daerah dibanding kepentingan pribadi maupun golongan. Kepala Daerah harus bersikap netral, jujur, arif, bijaksana serta adil dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi tata aturan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kepala Daerah sebagai pemimpin dalam pemerintahan harus sesuai dengan fungsi kepemimpinan. Pemimpin harus dapat menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan yaitu sebagai komunikator yang mengajukan suatu perintah dengan jelas agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Melakukan komunikasi dua arah sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan perintah dan tugas. Pemimpin juga ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Pelimpahan

wewenang juga diberikan dengan perintah yang jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Pemimpin dituntut agar dapat membimbing, mengarahkan, mengkoordinasi serta pengawasan terhadap anggotanya.

Manajemen pemerintahan daerah akan lebih efektif apabila implementasi dari pembagian kewenangan antara Kepala Daerah dan Wakilnya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan dituangkan secara tertulis (yuridis formal). Pembagian tugas, fungsi dan kewenangan tersebut dilakukan pada tahapan awal (perencanaan) penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga implementasi yang mengacu pada aturan yang jelas tersebut akan dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Solihat & Nugraha, 2016:17)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung pertama kali pada tahun 2005. Pilkada sudah mampu membuat suatu hubungan kerja yang terjalin antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah. Hubungan ini terjalin bersamaan dengan terpilihnya masing-masing calon untuk maju dalam pilkada, masing-masing kader mempunyai Wakil Kepala Daerah yang akan menjalankan visi dan misi yang telah dibuat sebelum menjabat menjadi Kepala Daerah. Penempatan Wakil Kepala Daerah hanya sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara paket.

Konteks hubungan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebut gagal mengharmoniskan hubungan keduanya, sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan di daerah. Dibutuhkan revisi UU tersebut termasuk yang mengatur tentang bagaimana seharusnya wakil kepala daerah dipilih, agar tidak melahirkan ketidakstabilan pemerintahan lokal (Guyanie, 2015:37).

Hubungan baik dan kekompakan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah sangat terlihat pada saat pencalonan, kampanye hingga pelantikan dan pengambilan sumpah sampai dengan syukuran pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hubungan yang baik dan kekompakan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada yang hanya berlangsung dan bertahan dalam hitungan beberapa tahun ataupun beberapa bulan saja setelah itu kekompakan tersebut perlahan menghilang. Perspektif kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah, Wakil Kepala Daerah atau Lembaga Wakil Kepala Daerah sebaiknya ditiadakan, kedudukan dan fungsi Wakil Kepala Daerah sebaiknya dapat digantikan oleh sekretaris (Haruni, 2013:164).

Perjalanan hubungan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah sering menimbulkan konflik hingga ketidakharmonisan. Berkurangnya keharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contoh ketidakharmonisan yaitu antara Bupati dan Wakil Bupati *Incumbent* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sidoarjo. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan pecahnya kongsi antara Bupati dan Wakil Bupati di Sidoarjo pada Pilkada tahun 2015 yaitu: Aspek internal partai yang hanya memfokuskan satu calon sebagai bupati. Aspek

eksternal partai terdapat tawaran lain untuk berkoalisi yang lebih berpeluang besar, serta salah satu calon bupati memiliki jaringan yang cukup besar di Sidoarjo. Langkah-langkah politik yang diambil oleh salah satu calon bupati sangat rasional sehingga mengambil keputusan untuk pecah kongsi (Taqwa,2015:8).

Ketidakharmonisan juga terjadi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2008-2013. Ketidakharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut terjadi karena pembagian tugas dan wewenang yang tidak melibatkan Wakil Gubernur dalam pembuatan berbagai kebijakan. Kepemimpinan satu paket terbukti mengandung unsur yang dapat menyebabkan disharmonisasi (Siregar, 2016:12). Berdasarkan beberapa penelitian tentang disharmonisasi antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah menunjukkan masalah yang cukup tinggi terjadi di Indonesia. Tabel di bawah ini adalah data kategori pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Kementerian Dalam Negeri tahun 2014:

Tabel 1. Data Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Pecah Kongsi” antara tahun 2005 hingga 2013.

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	Pecah Kongsi	971	94,64%
2.	Kompak	55	5,36%
3	Total	1026	100%

Sumber: Kementerian Dalam Negeri tahun 2014

Data dari Kementerian Dalam Negeri atau biasa disebut dengan Kemendagri seperti pada tabel 1 memperkuat fenomena retaknya kepemimpinan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengemukakan sebanyak 971

kepala daerah yang pecah kongsi atau 94,64% dari 1026 kepala daerah yang dipilih secara langsung antara tahun 2005 hingga 2013.

Hasil kajian Kementerian Dalam Negeri tersebut, Kepala Daerah yang tidak harmonis meliputi 57 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 914 pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari 1026 pemilihan Kepala Daerah, hanya 55 pasangan Kepala Daerah yang tetap harmonis sampai akhir masa jabatannya dan kemudian mengikuti Pemilihan Kepala Daerah periode kedua.

55 pasangan Kepala Daerah meliputi 6 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 49 pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hampir 95% Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pecah kongsi atau mengalami disharmonisasi ini mengisyaratkan bahwa hasil Pilkada belum menghasilkan pemimpin yang lebih solid dan berkualitas. Disharmonisasi pada pemimpin daerah tentu dapat mengganggu roda pemerintahan bahwa salah satu faktor pendorong peningkatan dan efektivitas kepemimpinan adalah hubungan yang harmonis.¹

Penelitian LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyebutkan besarnya persentase pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang konflik dan tidak harmonis disebabkan oleh:

1. Karena adanya koalisi yang dibangun hanya atas dasar memperkuat dukungan politik semata pada saat pilukada. Koalisi tidak dibangun

¹ Diakses melalui laman: <http://www.rakyatpos.com/retaknya-kepemimpinan-kepala-daerah-wakil-kepala-daerah.html/> pada tanggal 13 September 2018 pukul 13.00 WIB

atas dasar yang menjadi tujuan utama, yaitu stabilitas pemerintahan, akibatnya stabilitas pemerintahan tidak bertahan lama.

2. Selama ini koalisi yang terbangun dilakukan oleh gabungan dua parpol atau lebih, gabungan dua etnik yang berbeda atau gabungan dua kelompok keagamaan yang berbeda, akibatnya apabila terjadi sedikit gesekan maka akan menimbulkan konflik.
3. Tidak adanya ketegasan soal pembagian kewenangan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sehingga keduanya saling menyerobot kewenangan.
4. Terlalu dominannya Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan, di sisi lain tidak adanya kesadaran dari Wakil Kepala Daerah tentang posisinya. Keduanya merasa sama-sama berjuang saat Pilkada, sehingga menimbulkan keinginan menyamaratakan pembagian tugas terlebih pada proyek-proyek, atau sederajat dalam pengambilan keputusan terlebih pada penempatan pejabat pada eselonisasi, dan pindah tugas (Pegawai Negeri Sipil (PNS) pendukung masing-masing.
5. Sangat kuat *image*, bahwa menjadi Kepala Daerah adalah semata sebagai sarana mempopulerkan diri. Ketika populer, Wakil Kepala Daerah tak segan untuk menantang Kepala Daerahnya pada Pilkada berikutnya.²

Beberapa contoh ketidakharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, ketidakharmonisan juga terjadi di Provinsi Lampung tepatnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung,

² Diakses pada laman yusranlapananda.wordpress.com pada tanggal 26 September 2018 pukul 17.36 WIB

yaitu Herman HN sebagai Wali Kota Bandar Lampung dan Yusuf Kohar sebagai Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Tabel di bawah ini adalah data pribadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Data Pribadi Herman HN dan Yusuf Kohar.

No.	Kategori	Herman HN	Yusuf Kohar
1.	Nama Lengkap	Drs. H. Herman Hassanusi, M.M.	H. Muhammad Yusuf Kohar, S. E, M.M.
2.	Tempat Tanggal Lahir	Menggala, 17-05-1956	Palembang, 2-07-1961
3.	Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Negeri 1 Pagar Dewa 2. SMP Negeri 1 Tanjungkarang 3. SMA Negeri 1 Tanjungkarang 4. D-3 administrasi Negara, STIA Lampung 5. S-1 Administrasi Negara, STIA Lampung 6. S-2 Maginstes Manajemen, UBL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Negeri 57 Palembang 2. SMP Bina Warga Palembang 3. SMA Negeri 5 Palembang 4. D-3 FE Akuntansi Universitas Sriwijaya 5. S-1 Akuntansi Universitas Gajayana 6. S-2 Magister Manajemen Universitas Sriwijaya 7. Peserta Pendidikan Reguler Angkatan XLI Lemabaga Ketahanan Nasional

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung tahun 2016

Herman Hasanusi atau yang lebih dikenal sebagai Herman HN adalah Wali Kota Bandar Lampung periode 2010 hingga 2015 dan periode 2016 sampai 2021. Muhammad Yusuf Kohar adalah seorang pengusaha dan politisi. Yusuf Kohar mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota berpasangan dengan Herman HN pada Pemilihan Wali Kota 2015. Pilkada Serentak 2015 Herman HN dan Muhammad Yusuf Kohar memperoleh 86,66% suara dan perolehan suara tersebut telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar

Lampung dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung pada 16 Desember 2015.³

Herman HN bersama Yusuf Kohar resmi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung periode 2016-2021, setelah mengikuti pelantikan di Gedung DPRD Lampung pada Rabu, 17 Februari 2016. Seusai pelantikan, Herman kemudian mengikuti acara serah terima jabatan, dari Pejabat Wali Kota Bandar Lampung Sulpakar di Kantor Pemkot Bandar Lampung. Dari acara tersebut, Herman kemudian menuju rumah dinas. Keharmonisan setelah pelantikan sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung antara Herman HN dan Yusuf Kohar hanya berlangsung sementara. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, berbangga hati menunjukkan ketidakharmonisan dengan Wakil Wali Kota Bandar Lampung yaitu Yusuf Kohar.

Menurut orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini, menilai Yusuf Kohar suka main belakang saat digelarnya acara Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) beberapa waktu lalu. Yusuf Kohar juga dinilai telah menjelek-jelekan Herman HN ke masyarakat dan pejabat seperti Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.⁴

Orang nomor satu di kota tapis berseri ini menjelaskan bahwa telah memberi beberapa tugas untuk Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Yusuf Kohar sesuai dengan kemampuannya dalam rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri dan

³ Diakses melalui laman: <http://penaberlian.com/wali-kota-herman-hn-dan-wakil-walikota-yusuf-kohar-pecah-kongsi.html> pada tanggal 17 september 2018 pukul 12.53 WIB

⁴ *Ibid*

disaksikan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas serta Kepala Bagian setelah adanya pelantikan beberapa waktu lalu. Herman HN menegaskan bahwa sebagai seorang wakil seharusnya bersikap seperti seharusnya menjadi wakil, bukan untuk menjadi sama dengan dirinya.

Herman HN menilai bahwa wakilnya, Yusuf Kohar bersikap melebihi tugasnya sebagai Wakil Wali Kota. Tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota menurut Herman HN berbeda terutama dalam hal pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan. Tugas Wakil Wali Kota untuk membantu Wali Kota dalam proses untuk pelaksanaan pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan tersebut.

Herman HN sudah memberi wakilnya Yusuf Kohar beberapa tugas, untuk mengawasi pegawai Bandar Lampung, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) agar bisa terus meningkat, serta masalah kesehatan di Bandar Lampung. Herman menganggap wakilnya tersebut hanya diam di kantor dengan maksud ingin meminta diberi tugas lebih. Di lain sisi, Herman merasa lega bisa menyampaikan pikirannya, mengenai Yusuf Kohar selaku Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang dinilai suka bersikap kurang menyenangkan terhadap orang nomor satu Kota Tapis Berseri saat digelarnya acara PKK ini.⁵

Herman HN telah memberikan beberapa tugas untuk dilaksanakan oleh Yusuf Kohar, tetapi Herman menganggap wakilnya itu hanya diam saja di kantornya oleh karena itu tugas yang telah diberikan tersebut tidak terlaksana. Tugas-

⁵ Diakses melalui laman: <http://penaberlian.com/wali-kota-herman-hn-dan-wakil-walikota-yusuf-kohar-pecah-kongsi.html> pada tanggal 17 september 2018 pukul 12.53 WIB

tugas yang telah diberikan Herman kepada Yusuf menjadi tertunda sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penanganan berbagai masalah yang telah Herman percayakan kepada Wakilnya untuk ditangani. Herman HN menganggap Yusuf sering bertindak semaunya sendiri terhadap dirinya.

Yusuf Kohar mengaku tidak mempermasalahkan sikap Herman HN yang telah menudingnya telah berbuat kurang menyenangkan di hadapan Lurah dan Camat saat digelarnya rakor PKK. Yusuf berkata jika pembagian tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Rakor setelah pelantikan beberapa waktu lalu hanya sekedar omong kosong. Yusuf menegaskan bahwa Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN tidak pernah melimpahkan wewenang itu ke Yusuf Kohar sebagai Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Dia menegaskan tidak ada dokumen mengenai pembagian tugas terkait di meja kerjanya.⁶

Fenomena ketidakharmonisan dan perpecahan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di provinsi, kabupaten/kota, memang sudah banyak terjadi sebelum dan setelah Pilkada. Perpecahan pasangan Kepala Daerah tentu saja menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Hubungan yang tidak harmonis itu berpengaruh pada birokrasi. Ada birokrasi yang loyal Kepala Daerah, dan ada juga yang loyal kepada Wakilnya. Selain itu dalam setiap mengambil kebijakan, bisa terjadi beda pendapat antara Kepala Daerah dengan Wakilnya. Perbedaan pendapat ini

⁶ Diakses melalui laman: <http://penaberlian.com/wali-kota-herman-hn-dan-wakil-walikota-yusuf-kohar-pecah-kongsi.html> pada tanggal 17 september 2018 pukul 12.53 WIB

menimbulkan waktu yang panjang dalam mengambil keputusan suatu kebijakan.

Permasalahan ketidakharmonisan Kepala Daerah dengan Wakilnya mengakibatkan pelayanan pemerintahan tidak optimal dan rakyatlah yang dirugikan. Salah satunya yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu gesekan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung semakin menyeruak ke publik. Boleh saja mereka beranggapan bahwa hubungan antara mereka baik-baik saja. Beberapa sikap yang mereka tunjukkan ke hadapan publik mengisyaratkan telah terjadi keretakan di antara mereka.

Ketidakharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kemudian memperburuk pola kepemimpinan dalam melaksanakan pemerintahan di daerah. Harmonisasi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangatlah penting terhadap jalannya pemerintahan di daerah terutama untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat tentu akan merasakan dampaknya terhadap proses pemerintahan yang terganggu akibat kurang kompaknya Kepala Daerah dengan Wakil Kepala di daerahnya.

Hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak harmonis maka proses pemerintahan serta pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan baik juga tidak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung. Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertanggung jawab dalam memimpin daerah agar tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif serta efisien dapat terwujud di Kota Bandar Lampung.

Permasalahan hubungan kepemimpinan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah telah banyak dijadikan kajian oleh peneliti lain. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu meskipun sama-sama meneliti hubungan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini berfokus tentang sikap masyarakat terhadap ketidakharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung. Pendapat masyarakat tentang hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dengan menggunakan beberapa aspek sikap yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Penelitian tentang sikap masyarakat terhadap hubungan ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah belum banyak dikaji sehingga fenomena ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Sikap Masyarakat terhadap Ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Sikap Masyarakat terhadap Ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Sikap Masyarakat terhadap Ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan di bidang pemerintahan dan politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam pengetahuan akademik mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dan menambah pengetahuan tentang pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi tentang sikap masyarakat terhadap ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sikap Masyarakat

1. Pengertian Sikap

Herbert Spencer dalam (Ahmadi_(-2002:161) yang menggunakan kata ini menunjuk suatu status mental seseorang. Bagi para ahli psikologi, perhatian ,terhadap sikap berakar pada alasan perbedaan individual. Mengapa individu yang berbeda memperlihatkan tingkah laku yang berbeda dalam situasi yang sebagian besar gejala ini diterangkan oleh adanya perbedaan sikap. Menurut Sarwono (2012:201) istilah sikap yang dalam bahasa Inggris disebut “*attitude*” adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu.

Thustone dalam (Ahmadi_(-2002:163), mengatakan “sikap adalah kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan obyek psikologi. Obyek psikologi di sini meliputi : simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya”. “Orang dikatakan memiliki sikap positif terhadap suatu obyek psikologi apabila ia suka (*like*) atau memiliki sikap yang *favorable*, sebaliknya orang yang dikatakan memiliki sikap negatif terhadap obyek psikologi bila ia tidak suka (*dislike*) atau

sikapnya *unfavorable* terhadap obyek psikologi” Kurt dalam (Ahmadi_(-2002:163).

Menurut Gerungan dalam (Ahmadi_(-2002:164), “pengertian *attitude* dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap obyek tertentu, yang dapat merupakan sikap, pandangan, atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek”. Jadi *attitude* itu lebih diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan beraksi terhadap suatu hal.

Menurut GW Allport dalam (Widyastuti_(-2014:57) “sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respons individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya”.

Berdasarkan pendapat para ahli maka peneliti berpendapat bahwa sikap adalah keadaan mental dan saraf seseorang melalui pengalaman sehingga menimbulkan kecenderungan terhadap obyek tertentu yang bersifat positif atau negatif.

2. Teori Sikap

a). Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan dikemukakan oleh Heider. Prinsip dasar teori keseimbangan bahwa sikap individu harus selalu berada dalam kondisi yang seimbang. Keseimbangan akan tetap terjadi apabila individu

dalam hidupnya tetap konsisten dalam bersikap terhadap suatu obyek tertentu. Teori keseimbangan dalam bentuk sederhana melibatkan hubungan-hubungan antara seseorang dengan dua obyek sikap.

Keseimbangan sikap terhadap suatu obyek terkait dengan kesesuaian (*favorable*) dan ketidaksesuaian (*unfavorable*). Suatu obyek yang menurutnya baik, disukai dan dianggapnya positif, menimbulkan kesesuaian dengan dirinya, karena dianggap menyenangkan. Maka individu itu bersikap *favorable*. Sebaliknya suatu obyek yang menurutnya tidak baik tidak disukai, dan dianggapnya negatif, maka menimbulkan ketidaksesuaian dengan dirinya. Karena dianggap tidak menyenangkan (*unfavorable*). Teori ini lebih memfokuskan pada sikap konsisten. Hubungan afeksi dapat menghasilkan sistem yang tidak seimbang menjadi seimbang (Hadiwinarto, 2009:118).

Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori keseimbangan ialah seseorang yang apabila menganggap baik atau positif suatu objek maka akan menimbulkan kesesuaian atau positif terhadap dirinya. Kemudian diwujudkan melalui konsisten dalam bersikap.

b). Teori ketidaksesuaian (*dissonance theory*)

Teori ketidaksesuaian mengenai sikap, dikemukakan oleh Festinger dalam (Hadiwinarto, 2009:118) adanya teori ketidaksesuaian tentang sikap karena berkaitan dengan perilaku individu. Ada dua konsep yang dilawankan dalam teori ini, yakni teori konsonansi (*consonance*) yang

berarti selaras dan disonansi (*dissonance*) yang berarti ketidakselarasan. Teori ini menekankan pada individu untuk menyelaraskan elemen-elemen kognisi dan pemikiran, sebagai akibat adanya ketidakselarasan yaitu pikiran yang menekan dan memotivasi untuk memperbaikinya.

Menurut Festinger “yang dimaksud dengan elemen kognitif ialah mencakup pengetahuan, pandangan dan kepercayaan tentang lingkungan, seseorang atau tentang tindakan”. Pengertian disonansi adalah “tidak cocoknya antara dua atau tiga elemen-elemen kognitif” (Walgito, 2003:138).

Dalam teori ini terdapat dua elemen kognitif yang saling bertentangan, dan kalau dibiarkan, akan menimbulkan sikap ambivalensi. Karena keberadaan kedua elemen yang saling bertentangan (*dissonance*) itu mengganggu logika dalam berpikir. Cara mengurangi atau menghilangkan disonansi adalah dengan merubah salah satu elemen kognitif, yaitu dengan mengubah sikap agar sesuai dengan perilakunya (Hadiwinarto, 2009:118-119).

Berdasarkan pengertian ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori ketidaksesuaian adalah apabila terjadi ketidakcocokan seseorang terhadap pengetahuan, pandangan dan kepercayaan mengenai suatu objek maka akan menimbulkan sikap *ambivalent* yaitu keadaan dan perasaan bertentangan dengan seseorang.

c). Teori Konsistensi Kognitif-Afektif

Teori ini dikembangkan oleh Ressenberg. Teori ini memfokuskan pada suatu proses bagaimana seseorang berusaha membuat kognisi merekam konsisten dengan afeksinya. Penilaian seseorang terhadap suatu kejadian akan mempengaruhi keyakinanya, karena kognisi dan afeksinya sudah dibentuk. penilaian itu tidak diawali dari suatu pembuktian. Karena sudah terjadi kesamaan dalam dirinya antara kognitif atau pengetahuan dengan afektif atau perasaan. Dalam kondisi seperti itu, maka konasi atau kemauan dapat terkalahkan.

Suatu hal penting dalam penerapan teori ini adalah dalam kaitannya dengan perubahan sikap. Karena hubungan komponen afektif dengan komponen kognitifnya konsisten, maka bila komponen afektifnya berubah maka komponen kognitifnya juga berubah (Walgito, 2003:173).

Sebagai contoh, seseorang membatalkan kemauannya untuk makan di restoran "A" karena temannya memberitahu bahwa restoran tersebut tidak halal, padahal dia belum pernah makan di restoran tersebut. Di sini jelas bahwa telah terjadi dialog antara kognitif dan afektif hingga mencapai konsistensi pada tingkat tertentu (Hadiwinarto, 2009:119).

Berdasarkan pendapat ahli, maka sikap dalam teori konsistensi kognitif-afektif ialah penilaian seseorang terhadap objek akan mempengaruhi sikap dalam bertindak.

d). Teori Atribusi

Teori atribusi dalam psikologi sosial terkait dengan persoalan prososial atau penerimaan sosial. Penekanan teori ini bahwa individu menerima kehadiran orang lain setelah mengetahui perilaku dan penampilan nyata. Kesimpulan yang diambinya itu (menerima atau menolak), terkait dengan perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi. Dalam teori ketertarikan sosial, orang tertarik kepada orang lain karena penampilannya, bukan karena faktor lain. Orang yang sama, berada dalam dua situasi berbeda dengan penampilan berbeda, menurut teori ini dapat menyebabkan penerimaan orang lain menjadi berbeda (Hadiwinarto, 2009:120).

Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori atribusi ialah dalam menerima atau menolak suatu obyek, seseorang akan melihat kenyataan yang disesuaikan dengan persepsinya

e). Teori Belajar dan *Reinforcement*

Sikap dipelajari dengan cara yang sama seperti kebiasaan yang lainnya. orang memperoleh informasi dan fakta-fakta, mereka juga mempelajari perasaan-perasaan dan nilai-nilai berkaitan dengan fakta tersebut. Proses-proses dasar terjadinya belajar dapat diterapkan pada pembentukan sikap Individu dapat memperoleh informasi dan perasaan melalui proses asosiasi. Asosiasi terbentuk bila stimulus muncul pada saat dan tempat yang sama (Widyastuti, 2014:62).

Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori belajar dan *Reinforcement* ialah karena proses mempelajari perasaan-perasaan atau nilai-nilai berdasarkan kenyataan.

f). Teori Intensif

Teori ini memandang pembentukan sikap sebagai proses menimbang baik buruknya berbagai kemungkinan posisi dan kemudian mengambil alternatif yang terbaik. Teori intensif mengabaikan asal-usul sikap dan hanya mempertimbangkan intensif yang terjadi. Selain itu teori intensif menekankan keuntungan atau kerugian yang akan dialami seseorang dengan mengambil posisi tertentu.

Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori Intensif proses dimana seseorang menimbang baik atau buruk dari suatu kondisi untuk mengambil keputusan terbaik.

3. Fungsi Sikap

Menurut Katz dalam (Widyastuti_(-,2014:58), fungsi sikap antara lain adalah:

- 1). *Utilitarian Function*, dimana sikap memungkinkan untuk memperoleh atau memaksimalkan ganjaran (*reward*) atau persetujuan dan meminimalkan hukuman. Misalnya, seseorang dapat memperbaiki ekspresi atau sikapnya terhadap suatu obyek tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan.

- 2). *Knowledge Function*, yaitu bahwa sikap membantu dalam memahami lingkungan (sebagai skema) dengan melengkapi ringkasan evaluasi tentang obyek dan kelompok obyek atau segala sesuatu yang dijumpai di dunia ini.
- 3). *Value - Expressive Function* yaitu sikap kadang-kadang mengomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang terhadap orang lain.
- 4). *Ego - Defensive Function* yaitu sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri.

4. Komponen Sikap

Komponen sikap menurut Azwar (2016:23) sikap melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan yaitu:

- a). Komponen *Cognitive*: berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan obyek.
- b). Komponen *affective*: menunjuk pada dimensi emosional dari sikap yaitu berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
- c). Komponen *behavior* atau *conative*: melibatkan salah satu disposisi untuk bertindak terhadap obyek.

Sedangkan menurut Sears dalam (Widyastuti_(-2014:59), terdiri atas:

- a). Komponen kognitif dalam suatu sikap terdiri dari keyakinan seseorang mengenai obyek tersebut bersifat evaluatif yang melibatkan

diberikannya kualitas disukai atau tidak disukai, diperlukan atau tidak diperlukan, baik atau buruk terhadap obyek.

- b). Komponen Perasaan dalam suatu sikap berkenaan dengan emosi yang berkaitan dengan obyek tersebut. Obyek tersebut dirasakan sebagai hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai. Beban emosional inilah yang memberikan watak tertentu terhadap sikap yaitu watak mantap, tergerak dan termotivasi.
- c). Komponen kecenderungan tindakan dalam suatu sikap mencakup semua kesiapan perilaku yang berkaitan dengan sikap. Jika seseorang individu bersikap positif pada obyek tertentu, maka ia akan cenderung membantu atau memuji/ mendukung obyek tersebut. Jika bersikap negatif ia akan cenderung mengganggu atau menghukum atau merusak obyek tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa komponen sikap terdiri atas komponen kognitif, afektif dan behavior.

5. Karakteristik Sikap

Menurut Ahmadi (2002:178) ciri-ciri sikap adalah sebagai berikut:

- a). Sikap itu dipelajari (*learnability*)

Mempelajari sikap dengan sengaja bila individu itu mengerti bahwa hal itu akan membawa lebih baik (untuk dirinya sendiri), membantu tujuan kelompok, atau memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perseorangan.

- b). Memiliki kestabilan (*Stability*)

Sikap dimulai dari dipelajari kemudian menjadi lebih kuat, tetap dan stabil, melalui pengalaman.

c). *Personal - societal significance*

Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan juga antara orang dan barang atau situasi.

d). Berisi *Cognisi* dan affeksi

Komponen *cognisi* dari pada sikap adalah berisi informasi yang faktual, misalnya objek itu dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan.

e) *Approach - avoidance directionality*

Bila seseorang memiliki sikap yang *fovarable* terhadap sesuatu obyek, mereka akan mendekati dan membantunya, sebaliknya bila seseorang memiliki sikap *unfovarable*, mereka akan menghindarinya.

Sedangkan menurut Widyastuti (2014:58) karakteristik sikap adalah:

- a). Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku.
- b). Sikap ditujukan mengarah kepada obyek psikologis atau kategori dalam hal ini skema yang dimiliki orang menentukan bagaimana mereka mengkategorisasikan target obyek dimana sikap diarahkan.
- c). Sikap dipelajari memengaruhi perilaku. Pengukuran sikap yang mengarah pada suatu obyek memberikan alasan untuk berperilaku mengarah pada obyek itu dengan suatu cara tertentu.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri sikap yaitu sikap itu dipelajari, ditujukan kepada obyek dan memengaruhi tingkah laku.

6. Proses Pembentukan dan Perubahan Sikap

Pada dasarnya sikap bukan merupakan suatu bawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Pembentukan sikap sebagian dipengaruhi oleh pengalaman. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar, karenanya sikap dapat mengalami perubahan. Sebagai hasil belajar sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan obyek tertentu.

Menurut Sarlito (2012: 203), sikap dapat terbentuk atau berubah melalui empat macam cara:

- a).Adopsi, kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan memengaruhi terbentuknya sikap.
- b).Diferensiasi, dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang terjadi yang dianggap sejenis sekarang dipandang tersendiri dan lepas dari jenisnya. Misalkan seorang anak kecil yang mula-mula takut kepada setiap orang dewasa kecuali ibunya, tetapi lama kelamaan ia dapat membedakan antara ayah, paman yang disukai dengan orang asing yang tidak disukai.
- c).Integrasi, pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut.

d).Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan.

Sedangkan, menurut Bimo Walgito dalam (Widyastuti_(-2014:68), pembentukan dan perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor yaitu:

- a). Faktor Internal (Individu) yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luarnya dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak.
- b). Faktor Eksternal yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa proses pembentukan dan perubahan sikap melalui empat cara yaitu adopsi, diferensiasi, integrasi dan trauma dan dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal

7. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sistem adaptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan untuk bertahan. Mengenai arti masyarakat beberapa ahli memberikan definisi, menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam (Ahmadi_(-2009:225), mengatakan bahwa “Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil”.

Seorang sosiologi bangsa Belanda S.R. Steinmetz dalam (Ahmadi_(-2009:226), mengatakan bahwa “Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai perhubungan yang erat dan teratur”. Soerjono Soekanto dalam (Ismawati_(-2012:51), menjelaskan bahwa “Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar masyarakat adalah lokalitas dan perasaan”.

Berdasarkan tiga definisi para ahli maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya hubungan sosial yang erat dan kesamaan perasaan.

Menurut Ismawati (2012:50), setiap masyarakat memiliki komponen di bawah ini:

- a. Populasi, yakni warga suatu masyarakat yang dilihat dari sudut pandang kolektif.
- b. Kebudayaan, yakni hasil kerja, cipta dan rasa dari kehidupan bersama, yang mencakup: sistem lambang-lambang dan informasi.
- c. Hasil-hasil kebudayaan material. berupa benda-benda baik yang bisa bergerak seperti pesawat, maupun yang tidak bisa bergerak seperti candi.
- d. Organisasi sosial, yakni jaringan hubungan antara warga masyarakat yang bersangkutan, antara lain mencakup: warga masyarakat secara

individual, peranan-peranan, kelompok-kelompok sosial, kelas-kelas sosial.

- e. Lembaga-lembaga sosial dan sistemnya.

Ciri-ciri masyarakat menurut Setiadi (2012:84) yaitu:

- a. Sekumpulan orang.
- b. Sudah terbentuk lama.
- c. Sudah memiliki sistem dan struktur sosial tersendiri.
- d. Memiliki kepercayaan (nilai), sikap dan perilaku yang dimiliki bersama.
- e. Adanya keseimbangan dan pertahanan diri.
- f. Memiliki kebudayaan.

Berdasarkan definisi para ahli maka menurut peneliti sikap masyarakat adalah kecenderungan yang bersifat negatif atau positif dari sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya hubungan sosial yang erat.

B. Tinjauan Tentang Keharmonisan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Keharmonisan

Keharmonisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata harmonis yang berarti keselarasan atau keserasian. Keharmonisan berarti hubungan yang selaras, serasi, dan kompak antara dua orang atau lebih.

Keharmonisan perlu dijaga dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Harmonis dalam kehidupan dapat tercipta apabila setiap orang saling tenggang rasa dan lapang dada atau toleransi. Termasuk dalam hal ini yaitu penciptaan kondisi hidup dengan harmonis antara sesama makhluk sosial sangat menentukan kondisi kehidupan kita di masyarakat.

2. Keharmonisan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan daerah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Sebagaimana UU Pemda, kewenangan pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan pemerintahan wajib dan pilihan. Kewenangan pemerintahan wajib memiliki arti suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain lain. Sedangkan kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu.

Keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu seorang Wakil Kepala Daerah merupakan hubungan yang harus dijaga. Keharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah suatu kondisi sosial di mana

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersinergi untuk menjalankan pemerintahan yang baik demi kepentingan masyarakat tanpa mengurangi hak masing-masing untuk melaksanakan kewajibannya. Pasangan pemimpin di daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan haruslah kompak dan harmonis, agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya, guna mencapai tujuan pembangunan daerah yaitu kemakmuran rakyat, perlu adanya hubungan harmonis dari berbagai pihak. Termasuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan adanya hubungan yang harmonis, diharapkan terjalin kinerja yang sinergis sehingga pelayanan pemerintah daerah terhadap rakyat dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan dan memelihara keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harmonis berarti masing-masing individu baik Kepala Daerah maupun wakilnya harus mampu berkeja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas sebagai pasangan pemimpin di daerah. Kerja sama yang baik dalam memimpin pemerintahan dapat tercipta kerukunan dan keharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdampak pelaksanaan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Keharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kerukunan yang harus selalu terjaga dan dijiwai oleh masing-masing individu. Rukun menurut Amirullah Syarbini dkk (2007: 73) berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan damai tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dengan maksud saling membantu. Berperilaku rukun

berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau pribadi masing-masing sehingga hubungan-hubungan sosial tetap terlihat selaras dan baik. Dengan adanya kerukunan pasangan pemimpin daerah merupakan potensi yang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar pembangunan daerah. Keharmonisan pasangan pemimpin daerah akan menjamin dan terpelihara stabilitas pemerintahan sebagai syarat untuk berhasilnya pembangunan.

3. Faktor Penghambat Keharmonisan

Faktor penghambat keharmonisan menurut Tjipto (1994:167) yaitu:

- a. Kurang terlaksana prinsip kerja sama yaitu berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik, memperhatikan kepentingan bersama, dan prinsip yang saling menguntungkan.
- b. Kerja sama yang kurang baik seperti kurang terbuka dalam hal komunikasi, kurang mengerti satu sama lain dalam menyelesaikan masalah, kurang kompak dalam pelaksanaan tujuan yang telah disepakati bersama, dan sikap individualisme yang tinggi.
- c. Tidak merasa cocok di suatu organisasi, kurang mengenal satu sama lain dengan rekan kerja sama, tidak saling ketergantungan untuk memperkuat kebersamaan dalam kerja sama, dan kurang terampil dalam menangani konflik.
- d. Tidak tercapai manfaat kerja sama yaitu program organisasi tidak berjalan dengan baik, tidak menghemat waktu, biaya, serta tenaga dalam organisasi, dan mengurangi citra positif lembaga sehingga kurang dipercaya oleh masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

1. Kepala Daerah

Pola kepemimpinan Kepala Daerah dalam mencapai tujuannya yakni *good governance* para pemimpin daerah harus mempunyai perilaku-perilaku kepemimpinan yang positif (J. Kaloh, 2009).

1. Menyebarkan Informasi (*Informating*)

Perilaku ini dalam menyebarkan informasi yang relevan seperti keputusan dan rencana, memberi informasi teknis yang dibutuhkan bawahan dalam melakukan pekerjaannya, menginformasikan kepada bawahan tentang kemajuan yang dicapai organisasi secara keseluruhan. Penyebaran informasi juga sarana organisasi dalam rangka pengembangan organisasi maupun untuk membina hubungan kerja antara anggota organisasi.

2. Konsultasi dan Delegasi (*Consulting and Delegating*)

Perilaku ini merupakan tindakan pemimpin untuk membahas bersama pihak lain sebelum membuat keputusan, memberikan saran yang dapat mendorong kemajuan, memberikan kesempatan atau keleluasaan kepada bawahan untuk mengambil keputusan serta memberi kesempatan kepada bawahan untuk melaksanakan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok.

3. Perilaku Perencanaan dan Pengorganisasian (*Planning and Organizing*)

Perilaku ini merupakan tindakan pemimpin dalam wujud merumuskan tujuan dan strategi untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan

lingkungan, merumuskan bagaimana mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan, merumuskan bagaimana mengembangkan referensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan bagaimana melakukan koordinasi yang baik dengan pihak lain.

4. Perilaku Pemecahan Masalah (*Problem Solving*)

Merupakan tindakan pemimpin dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, menganalisis masalah secara sistematis dan terus menerus guna mengidentifikasi penyebab dan menemukan pemecahannya, konsekuen melaksanakan keputusan dan tegas dalam mengatasi masalah atau krisis yang dihadapi organisasi

5. Perilaku Merumuskan Peranan dan Tujuan (*Clarifying*)

Perilaku yang dalam wujud merumuskan tugas-tugas, menetapkan arah pekerjaan, memberi pengertian tentang tanggung jawab yang diemban sehubungan dengan jabatan, merumuskan tujuan yang akan dicapai, menentukan batas waktu penyelesaian tugas dan mengarahkan bawahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi.

6. Perilaku Pemantauan (*Monitoring*)

Sikap dan tindakan pemimpin guna memperoleh informasi tentang kegiatan kerja, melakukan pengecekan tentang kemajuan dan kualitas pekerjaan, evaluasi kinerja bawahan dan unit instansi di lingkungan organisasi dan melakukan pengamatan untuk mengetahui berbagai peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas dan program organisasi.

7. Perilaku Motivasi (*Motivating*)

Sikap atau tindakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi emosi bawahan dengan menggunakan nilai-nilai serta logika guna mendorong antusiasme atau semangat kerja pegawai, menumbuhkan komitmen terhadap tujuan dan tugas, bersedia melakukan kerja sama, memberi bantuan dan dukungan. Pemberian motivasi juga dimaksudkan untuk mempengaruhi emosi bawahan dan menumbuhkan komitmen terhadap tugas dan tujuan, serta mengembangkan hubungan kerja sama, yang diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kegairahan bawahan dalam menjalankan tugasnya.

8. Perilaku Pengakuan dan Pengharapan

Perilaku atau sikap pemimpin untuk menyediakan hadiah, pengakuan dan penghargaan kepada bawahan yang kecakapannya baik, dan yang memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan organisasi.

9. Perilaku Dukungan (*Supporting*)

Merupakan perilaku atau sikap dan tindakan pimpinan yang terungkap dalam bentuk sifat bersahabat, baik budi, suka membantu, selalu menunjukkan dukungan dan simpati kepada bawahan dan melakukan sesuatu untuk mendorong agar kemampuannya meningkat dan karirnya berkembang. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi antara lain dipengaruhi oleh adanya perilaku saling mendukung antara pemimpin terhadap bawahan, bawahan terhadap pemimpin, maupun bawahan dengan bawahan.

10. Perilaku Mencegah Konflik dan Mengembangkan Kelompok

Perilaku atau sikap pemimpin untuk mendorong dan menyediakan fasilitas yang konstruktif dalam pemecahan masalah, dan mendorong atau mengembangkan kerjasama kelompok yang cocok dalam penyelenggaraan tugas-tugas atau program organisasi.

11. Perilaku Membuat Jaringan

Sikap seorang pemimpin dalam wujud membaaur secara informal, membangun hubungan dengan orang yang memiliki sumber informasi dan dukungan, memantapkan hubungan dengan semua pihak yang terkait secara periodik melalui kunjungan, telepon, surat-menyurat dan kehadiran dalam rapat-rapat serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Secara teoritis *good governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kekuasaan juga didasarkan pada aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat pada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum.

Bagaimanapun juga keharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat diperlukan dalam percepatan pembangunan di daerah pada khususnya. Sikap, metode dan pola kepemimpinan yang diterapkan oleh masing-masing pemimpin Kepala Daerah akan sangat bergantung dengan

tujuan dan visi, misi yang akan dicapai. Kebudayaan yang melekat di masing-masing daerah juga akan mempengaruhi pola pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Untuk saat ini, kepemimpinan Kepala Daerah mengikuti pola dan perintah otonomi daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah. berdasarkan asas *good governance* yang menjadi tujuan utama dari masing-masing kepala daerah. Masih banyak daerah-daerah yang kurang berhasil menjalankan pemerintahannya dan masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Kepala Daerah untuk membenahi pemerintahannya sendiri. Mulai dari sistem pemerintahan, budaya daerah, aroma primodialisme yang masih kental. Tugas berat yang diemban Kepala Daerah untuk menyatukan keragaman itu semua merupakan hambatan yang harus diselesaikan guna membangun daerah yang lebih maju.

2. Wakil Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah ialah wakil dari pucuk pimpinan (Kepala Daerah) di suatu wilayah pemerintahan. Wakil Kepala Daerah sesungguhnya mempunyai kedudukan yang setara dengan Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan.

Pada dasarnya peran Wakil Kepala Daerah nampak pada saat pencalonan. Peran dalam dimensi politik yakni memperluas basis dukungan politik Kepala Daerah untuk memenangkan Pilkada. Kontribusi calon Wakil Kepala Daerah cukup besar untuk memenangkan pertarungan Pilkada.

Kontribusi bisa diwujudkan dalam bentuk politik (anggota partai politik pengusung), dalam bentuk finansial, atau dalam bentuk perluasan dukungan yang biasanya diambil dari tokoh masyarakat berbasis agama, suku atau kedaerahan.

Arti penting Wakil Kepala Daerah hanya terjadi saat pencalonan. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan, hampir-hampir peran dan fungsinya tidak ada. Bilapun ada, hanya menyandarkan pada Kepala Dearah untuk membagi kekuasannya.

Tugas dari Wakil Kepala Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah,
3. Menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi Wakil Kepala Daerah provinsi;
5. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota;

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
7. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah; dan
8. Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pembagian kekuasaan untuk menjalankan tugas dan kewenangan tertentu sangat dipengaruhi seberapa besar kontribusi Wakil Kepala Daerah saat pencalonan. Posisi Wakil Kepala Daerah tidak lebih sebagai pembantu Kepala Daerah, dimana tugas dan kewenangan yang dijalankan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala daerah.

D. Sikap Masyarakat Terhadap Ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Beberapa definisi tentang sikap menurut para ahli kemudian peneliti simpulkan bahwa sikap adalah suatu kumpulan pendapat dan keyakinan atau kognitif

seseorang mengenai objek tertentu, yang disertai perasaan tertentu atau afektif, dan memberikan dasar bagi kecenderungan berperilaku atau merespon objek tersebut dengan cara yang khusus atau konatif.

Keadaan tidak harmonis antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut peneliti adalah bentuk negatif dari hubungan kerja sama yang kurang terjalin dengan baik dalam proses pemerintahan di daerah. Sejumlah ahli dan lembaga meyakini instrumen desentralisasi berkorelasi positif dengan tujuan reformasi administrasi karena menghasilkan masyarakat yang damai sekaligus mendorong pembangunan sebagai pengejawantahan nilai demokrasi, instrumen desentralisasi mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis. Daerah otonom diasumsikan lebih dekat menjangkau masyarakat sehingga memudahkan mengidentifikasi kebutuhan rakyatnya dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Fjeldstad, 2003:1)

Sikap Masyarakat terhadap ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kumpulan pendapat, keyakinan, perasaan, dan kecenderungan perilaku masyarakat, baik itu mendukung (positif), ataupun menentang (negatif), terhadap fenomena ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan pelaksanaan pemerintahan daerah.

E. Kerangka Pikir

Kepala Daerah merupakan seorang yang diberi amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Pemimpin daerah selain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik

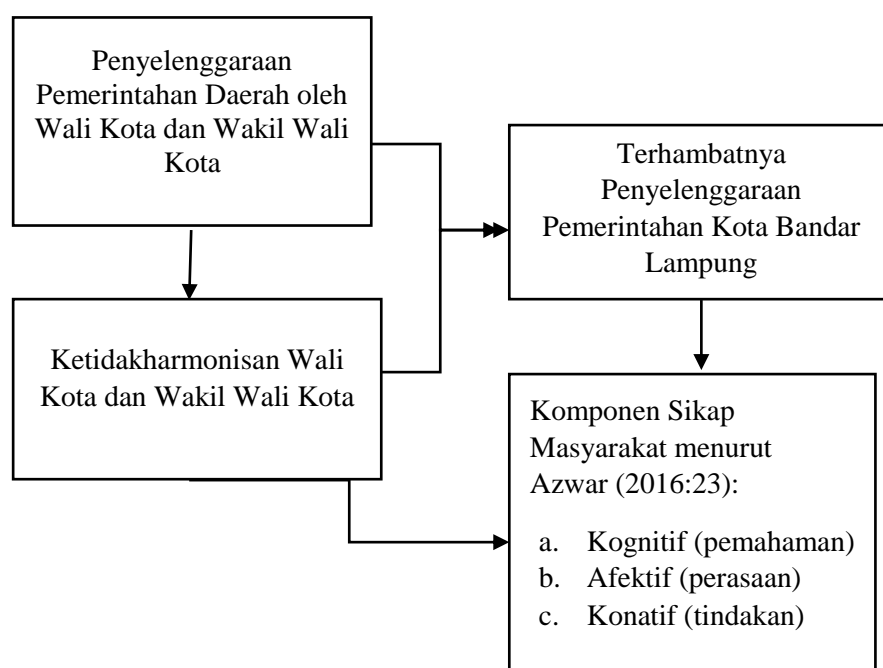
yang terpilih berdasarkan *political recruitment* atau model pemilihan (*elections*) yang bersifat langsung (*direct*) dan menjalankan amanah rakyat. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diibaratkan sebagai pasangan yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal pengelola maupun pemegang kuasa kepemimpinan di daerah.

Tetapi hubungan yang baik dan kekompakan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada yang hanya berlangsung dan bertahan dalam hitungan beberapa tahun ataupun beberapa bulan saja setelah itu kekompakan tersebut perlahan menghilang. Ketidakharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu antara Herman HN sebagai Wali Kota dan Yusuf Kohar sebagai Wakil Wali Kota. Ketidakharmonisan antara pasangan Walikota tersebut kemudian memperburuk pola kepemimpinan pemerintahan daerah di Kota Bandar Lampung. Harmonisasi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangatlah penting terhadap jalannya pemerintahan di Bandar Lampung terutama untuk kepentingan masyarakat.

Masyarakat Kota Bandar Lampung tentu akan merasakan dampaknya terhadap proses pemerintahan yang terganggu akibat kurang kompaknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota di daerahnya. Selain itu jika hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung baik-baik saja maka proses pemerintahan serta pembangunan akan berjalan dengan baik juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Sikap masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap ketidakharmonisan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2016-2021 dinilai berdasarkan beberapa komponen sikap menurut Azwar (2016:23) yaitu kognitif atau pemahaman, afektif atau perasaan, dan konatif atau tindakan.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah peneliti uraikan di atas maka ditetapkan teori kerangka pikir proses penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Bagan Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2019

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang analisis datanya hanya pada taraf deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Azwar, 2001).

Peneliti memilih menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif adalah karena berdasarkan tujuannya yaitu untuk menerangkan serta menggambarkan fenomena yang sedang terjadi mengenai ketidakharmonisan antara Wali Kota Bandar Lampung yaitu Herman HN dengan Wakilnya Muhammad Yusuf Kohar. Terkait kurang harmonisnya hubungan antara Kepala Daerah dengan Wakilnya pada periode 2016-2021 di Kota Bandar Lampung dengan menganalisis sikap masyarakat terhadap ketidakharmonisan yang terjadi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemerintahan di daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Dalam penelitian kuantitatif, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi dapat berupa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada tahun 2019.

Peneliti memilih Kecamatan Kemiling sebagai lokasi penelitian adalah karena Kecamatan Kemiling termasuk kecamatan yang paling banyak penduduknya di Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih satu kecamatan yaitu Kecamatan Kemiling sebagai populasi penelitian karena agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan spesifik pada sampel yang kemudian akan mewakili populasi di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

C. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti, dan diambil datanya (Hamidi, 2010:141). Mengemukakan definisi konseptual variabel penelitian sangat penting karena peneliti memperoleh

kejelasan pengertian variabel yang diukur. Jika definisi konseptual telah dikemukakan oleh peneliti, maka perbedaan pemberian arti atau penafsiran terhadap variabel antara peneliti dan pembaca akan terhindarkan. Pemberian batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian akan memudahkan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Definisi konseptual dari suatu variabel dapat diperoleh dari buku bacaan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan definisi konseptual sebagai berikut:

a. Sikap Masyarakat

Sikap adalah suatu kumpulan pendapat dan keyakinan (kognitif) seseorang mengenai obyek tertentu, yang disertai perasaan tertentu (afektif), dan memberikan dasar bagi kecenderungan berperilaku atau merespon obyek tersebut dengan cara yang khusus (konatif). Sikap masyarakat adalah suatu kumpulan pendapat dan keyakinan atau kognitif masyarakat mengenai objek tertentu, yang disertai perasaan tertentu atau afektif, dan memberikan dasar bagi kecenderungan berperilaku atau merespon objek tersebut dengan cara yang khusus atau konatif.

Komponen sikap menurut Azwar (2016:23) sikap melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan yaitu:

1. Komponen *Cognitive*: berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan obyek.
 2. Komponen *affective*: menunjuk pada dimensi emosional dari sikap yaitu berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
 3. Komponen *behavior* atau *conative*: melibatkan salah satu disposisi untuk bertindak terhadap obyek.
- b. Ketidakharmisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Ketidakharmisan yaitu fenomena tidak berjalannya kerja sama yang baik sebagai pemimpin daerah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah yang diukur dengan skala sikap terhadap ketidakharmisan. Skala menggunakan metode Likert.
- Ketidakharmisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut peneliti adalah bentuk negatif dari hubungan kerja sama yang terjalin kurang baik dalam memimpin pemerintahan daerah. Kerja sama yang baik dalam memimpin daerah diperlukan untuk mencapai suatu tujuan bersama yaitu untuk membangun daerah dan melayani masyarakat yang telah disepakati antar beberapa orang atau kelompok.
- c. Sikap Masyarakat terhadap ketidakharmisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sikap masyarakat terhadap fenomena ketidakharmisan Wali Kota dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kumpulan

pendapat, keyakinan, perasaan dan kecenderungan perilaku masyarakat, baik itu mendukung (sikap positif) ataupun menentang (sikap negatif), terhadap ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur (Hamidi, 2010:142). Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Berdasarkan definisi operasional penelitian, maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Indikator sikap masyarakat terhadap ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Definisi Operasional

No.	Komponen	Indikator
1.	Aspek kognitif (pemahaman)	Pengetahuan terhadap ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Perselisihan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota - Wakil Wali Kota berasal dari kalangan pengusaha. - Wali Kota berkata telah salah memilih Wakil. - Komunikasi kurang berjalan dengan baik antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. - Wakil Wali Kota tidak melaksanakan tugas yang diberi oleh Wali Kota. - Wakil Wali Kota berkata tidak diberi tugas oleh Wali Kota.
2.	Aspek afektif (perasaan)	Pendapat terhadap ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Wali Kota dan Wakil Wali Kota

No.	Komponen	Indikator
		<p>saling menyalahkan satu sama lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wali Kota dan Wakil Wali Kota kurang menjaga keharmonisan sebagai pasangan pemimpin. - Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak kompak sebagai pasangan pemimpin. - Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengutamakan keinginannya masing-masing. - Wali Kota terlalu dominan dalam pengambilan keputusan. - Wakil Wali Kota melakukan tugas yang sama dengan Wali Kota.
3.	Aspek konatif (tindakan)	<p>Perilaku terhadap ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendukung program pemerintah walaupun terjadi ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. - Tidak mendukung program pemerintah jika terjadi ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. - Ikut berpartisipasi dalam program pemerintah walaupun terjadi ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. - Tidak ikut berpartisipasi dalam program pemerintah jika terjadi ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. - Tidak percaya kepada pemerintah karena terjadi ketidakharmonisan. - Tetap percaya kepada pemerintah walaupun terjadi ketidakharmonisan. - Puas dengan pemerintahan walaupun terjadi ketidakharmonisan. - Tidak puas kepada pemerintah karena terjadi ketidakharmonisan.

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2019

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono dalam Hidayat, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Daftar jumlah penduduk Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Persentasi
1.	Sumber Agung	3.426	5,1%
2.	Kedaung	1.350	2%
3.	Pinang Raya	4.448	6,6%
4.	Beringin Raya	12.342	18,4%
5.	Sumber Rejo	11.702	17,4%
6.	Kemiling Permai	13.191	19,7%
7.	Suber Rejo Sejahtera	5.777	8,6%
8.	Beringin Jaya	8.300	12,4%
9.	Kemiling Raya	6.367	9,5%
Jumlah		66.903	100%

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung tahun 2016

Sampel adalah bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *probality sampling* (sampel probalitas, sampel berpeluang) dengan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *simple random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel (Siregar 2016: 145)

Untuk menghitung jumlah sampel peneliti menggunakan rumus Slovin dengan notasi:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel minimal

N = populasi

e = nilai eror (10%)

Maka jumlah sampel yaitu: $\frac{66.903}{1+66.903(0.1)^2} = 99,8 = 100$

Tabel di bawah ini adalah sampel untuk penelitian yang diambil berdasarkan populasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sampel penduduk Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Sumber Agung	$\frac{3.426}{66.903} \times 100 = 6$
2.	Kedaung	$\frac{1.350}{66.903} \times 100 = 2$
3.	Pinang Raya	$\frac{4.448}{66.903} \times 100 = 8$
4.	Beringin Raya	$\frac{12.342}{66.903} \times 100 = 18$
5.	Sumber Rejo	$\frac{11.702}{66.903} \times 100 = 16$
6.	Kemiling Permai	$\frac{13.191}{66.903} \times 100 = 20$
7.	Sumber Rejo Sejahtera	$\frac{5.777}{66.903} \times 100 = 8$
8.	Beringin Jaya	$\frac{8.300}{66.903} \times 100 = 12$
9.	Kemiling Raya	$\frac{6.367}{66.903} \times 100 = 10$
Jumlah		100

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2019

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel (Siregar 2016: 145). Teknik *simple random sampling* merupakan suatu teknik yang dipilih secara acak karena analisa penelitian cenderung bersifat deskriptif atau umum. Sampel dipilih dengan metode kotak acak serta menggunakan *software microsoft excel*. Pemilihan dilakukan di beberapa RT yang terpilih kemudian diacak sesuai dengan nomor pada daftar Kartu Keluarga (KK) yang ada pada setiap RT. Karena jumlah KK tiap RT adalah kurang dari 100, maka menggunakan rumus acak pada *microsoft excel* yaitu $=INT(RAND()*(100-1)+1)$. Responden yang terpilih berdasarkan jenis kelamin yaitu 50 responden laki-laki dan 50 responden perempuan.

Peneliti memilih sampel berdasarkan beberapa kategori yaitu:

1. Betempat tinggal di Kecamatan Kemiling
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bandar Lampung
3. Terdaftar dalam Kartu Keluarga Kota Bandar Lampung.
4. Berusia antara 17-60 tahun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah angket atau kuesioner. Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi angket tersebut bersedia memberikan respons sesuai

permintaan. Angket dibagi dalam tiga bagian, yaitu: angket tertutup, angket terbuka, dan angket model campuran (Idrus, 2009:100).

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang jumlah item dan jawabannya telah ditentukan, jadi responden tinggal memilihnya. Pengukuran atas jawaban dari angket yang diajukan kepada responden, skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2012:87). Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Tabel di bawah ini adalah skor untuk kategori setiap jawaban yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai/skor untuk berdasarkan kategori jawaban.

NO.	Jawaban	Nilai/Skor negatif	Nilai/Skor positif
1.	Sangat Setuju	1	4
2.	Setuju	2	3
3.	Tidak Setuju	3	2
4.	Sangat Tidak Setuju	4	1

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2019

Maksud kategorisasi jawaban SS – S – TS – STS adalah terutama untuk melihat kecenderungan pendapat responden, ke arah setuju atau tidak setuju. Sesuai dengan teori tersebut, maka dalam penelitian ini respon skala Likert dimodifikasi menjadi empat kategori jawaban yaitu terdiri dari empat kategori bentuk yang menyatakan kesetujuan dan ketidaksetujuan dalam jawaban, yaitu : SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju) dan STS (sangat tidak setuju).

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan data yang telah terkumpul, menyajikan dalam susunan yang baik, kemudian dianalisis (Siswanto, 2012:70). Data yang baru dikumpulkan dinamakan data mentah. Data mentah belum dapat dibaca atau memiliki informasi. Data mentah tersebut perlu diolah terlebih dahulu agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

1. Penyuntingan (*Editing*)

Penyuntingan dilakukan untuk memeriksa semua jawaban responden, karena kadang terjadi kecacatan dalam angket, misalnya responden sengaja menjawab salah.

2. Pengkodean (*Coding*)

Pengkodean dilakukan untuk menyederhanakan jawaban responden. Mengkode data berarti memberikan kode-kode (identitas) tertentu kepada masing-masing kategori (nilai dari setiap variabel yang dikumpulkan datanya). Kuesioner akan diberi nilai sesuai dengan bobot butir isian dalam kuesioner tersebut dengan menggunakan skala Likert.

3. Tabulasi Data

Tabulasi dilakukan dengan menyusun dan menghitung data hasil pengkodean, kemudian dibuat tabel agar mudah terbaca. Tabulasi biasanya terdiri dari jumlah data, presentase dan lain sebagainya.

Setelah menentukan satuan yang diperoleh, sekaligus jenis data atau tingkatan skor jawaban yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan perhitungan rumus interval. Analisis data

dengan menggunakan analisis kuantitatif kemudian dijelaskan secara kualitatif. Untuk mengetahui presentase dari jawaban responden peneliti menggunakan rumus presentase berikut ini:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Sumber : Arikunto (2002: 123)

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi jawaban dibagi jumlah pertanyaan

N : Jumlah responden

Selanjutnya, untuk mengategorikan sikap masyarakat menggunakan perhitungan rumus interval sebagai berikut:

Rumus interval:

$$I$$

Sumber : Sutrisno Hadi (1998: 421)

Keterangan :

I = Interval nilai skor

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori jawaban

$$\text{Maka interval kelas} = \frac{4-1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75$$

Interval kelas menggunakan statistik frekuensi hasil secara keseluruhan analisis tabulasi sederhana berdasarkan skor ideal tertinggi dan skor terendah untuk memberikan gambaran mengenai kondisi responden terkait sikap masyarakat, dapat diketahui kategori jawaban responden masing-masing variabel, yaitu :

Tabel 7. Skala Interval Kelas

Skala Interval	Kategori
3.26 – 4.00	Sangat Negatif
2.51 – 3,25	Negatif
1.76 – 2.50	Positif
1.00 – 1.75	Sangat Positif

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2019

Berdasarkan tabel 7 di atas telah diketahui interval kelas, selanjutnya dapat disusun kategori jawaban responden dari indikator-indikator sikap masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kategori negatif, yaitu 2.51 – 4.00
2. Untuk kategori positif, yaitu 1.00 – 2.50

G. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk kemudian diinterpretasikan dalam menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan. Analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dalam penelitian kuantitatif, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan non parametris. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase (Sugiyono, 2009:207-208).

Analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terdapat di balik semua data tersebut, mengelompokannya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut. Dalam proses menganalisa data seringkali menggunakan statistika karena memang salah satu fungsi statistika adalah menyederhanakan data. Proses analisa data tidak hanya sampai disini. Analisa data belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah data dianalisa dan diperoleh informasi yang lebih sederhana, hasil analisa terus harus diinterpretasi untuk mencari makna yang lebih luas dan impilkasi hasil-hasil analisa (Anas, 2006).

IV. GAMBARAN UMUM

A. Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung juga merupakan kota terpadat dan terbesar ketiga di Pulau Sumatera menurut jumlah penduduknya, serta termasuk kota terpadat di luar Jawa dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berada antara 50°20'-50°30' LS dan 105°28'-105°37' BT dan memiliki luas wilayah 169,21km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dengan populasi penduduk 1.015.910 jiwa (BPS tahun 2017).



Gambar 2. Peta Kota Bandar Lampung⁷

⁷ id.m.wikipedia.org/Alzena2nd diakses pada 2 Agustus 2019 pukul 08.00

Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung perkecamatan di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Perkecamatan di Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kedaton	58875
2	Sukarame	56768
3	Tanjung Karang Barat	35218
4	Tanjung Karang Pusat	50901
5	Tanjung Karang Timur	49835
6	Teluk Betung Utara	59496
7	Teluk Betung Barat	47496
8	Teluk Betung Selatan	46528
9	Teluk Betung Timur	59061
10	Bumi Waras	30917
11	Kedamaian	40836
12	Enggal	43212
13	Langkapura	54571
14	Panjang	52497
15	Kemiling	66903
16	Rajabasa	53046
17	Labuhan Ratu	38505
18	Sukabumi	29140
19	Tanjung Senang	68105
20	Way Halim	63805
Jumlah		1015 910

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung tahun 2017

Sejarah perkembangan perubahan kecamatan di Kota Bandar Lampung dimulai pada tahun 1942-1948 dengan sebutan *Onderafdeling Telokbetong* yang terdiri dari dua kecamatan yaitu Tanjungkarang dan Telukbetung. Pada tahun 1948-1950 masih dengan dua kecamatan yang sama tetapi

dengan sebutan yang berbeda yaitu Kota Besar Tanjungkarang – Telukbetung dengan Walikota RA Basyid. Tahun 1950-1965 penyebutan nama kota berubah lagi menjadi Kotapraja Tanjungkarang – Telukbetung dengan jumlah kecamatan yang masih sama yaitu Tanjungkarang dan Telukbetung. Jumlah kecamatan bertambah pada tahun 1965-1982 dengan sebutan Kotamadya Tanjungkarang – Telukbetung yaitu empat kecamatan adalah kecamatan Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Timur, Telukbetung Utara dan Telukbetung Selatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 30 kelurahan.

Sejarah jumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung terus bertambah pada 1982-1983 dengan sebutan yang sama yaitu Kotamadya Tanjungkarang – Telukbetung bertambah lima kecamatan dari hasil pemekaran yaitu Tanjungkarang Pusat, Telukbetung Barat, Kedaton, Panjang dan Sukarame sehingga menjadi 9 kecamatan dan 58 kelurahan. Pada tahun 1983-1999 penyebutan berubah menjadi Kotamadya Bandar Lampung dan bertambah kelurahan sebanyak 84 kelurahan. Tahun 1999-2001 berubah penyebutan menjadi Kota Bandar Lampung dan tahun 2001-2012 bertambah jumlah kecamatan dari hasil pemekaran sebanyak 4 yaitu kecamatan Tanjung Seneng, Rajabasa, Kemiling dan Sukabumi. Tahun 2012-sekarang bertambah kecamatan dari hasil pemekaran sebanyak 7 kecamatan yaitu Labuhan Ratu, Way Halim, Langkapura, Enggal, Kedaamaian, Telukbetung Timur dan Bumi Waras. (bandarlampungkota.go.id diakses pada 4 Agustus 2019 pukul 20:16 WIB)

Mayoritas penduduk kota Bandar Lampung berasal dari etnis Jawa (79,12%). Etnis berikutnya yang cukup mudah ditemui di kota Bandar Lampung yaitu etnis Sunda (10,72%) Lampung dan Bali (2,42%). Orang Jawa di Bandar Lampung tersebar di hampir semua kawasan kota dan umumnya telah membaaur dengan orang dari etnis lain, sedangkan orang Bali lebih mengelompok dengan mendiami beberapa kantong pemukiman Bali di Bandar Lampung. Selain itu terdapat pula etnis Tionghoa, Padang, Palembang, Bugis, Batak dan lain-lain.

Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Wali Kota. Jabatan Wali Kota Bandar Lampung saat ini dijabat oleh Drs. H. Herman HN, M.M. dengan jabatan Wakil Wakil Kota dijabat oleh Yusuf Kohar. Sejak tahun 1965 hingga saat Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Wali Kota yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Sejarah Wali Kota Bandar Lampung

No.	Nama Wali Kota	Periode
1.	RA Basyid	1948
2.	Sumarsono	1956-1957
3.	H. Zainal Abidin P.A.	1957-1963
4.	Alimudin Umar, S.H.	1963-1969
5.	Drs. H. M. Thabrani Daud	1969-1976
6.	Drs. H. Fauzi Saleh	1976-1981
7.	Drs. H. Zulkarnain Subing	1981-1986
8.	Drs. H. A. Nurdin Muhayat	1986-1995
9.	Drs. H. Suharto	1996-2006
10.	Edy Sutrisno, S.Pd., M.Pd.	2006-2010
11.	Drs. Herman HN, M.M.	2010-sekarang

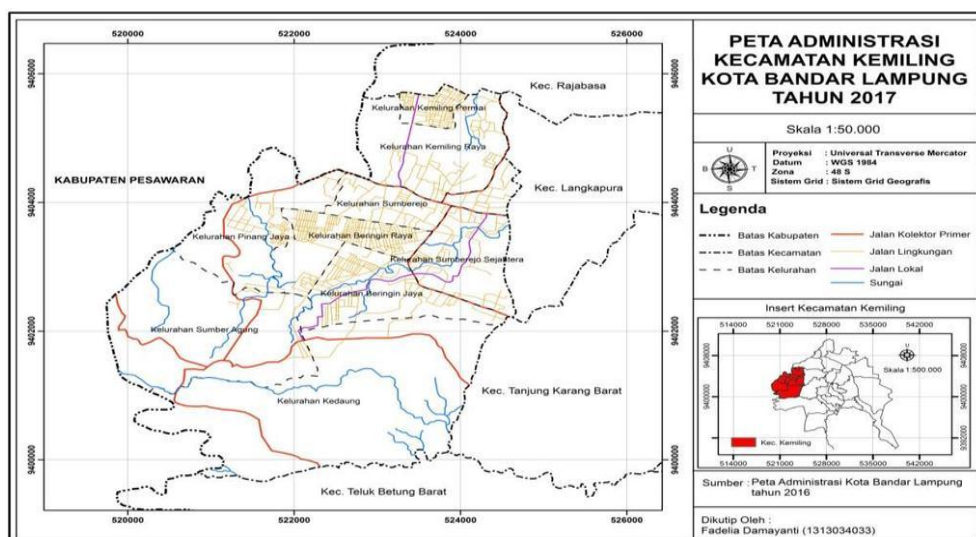
Sumber: BPS Kota Bandar Lampung 2017

Sejak tahun 1956 sampai dengan sekarang Kota Bandar Lampung telah dipimpin oleh 10 wali kota. Herman menjabat sebagai Wali Kota Bandar Lampung sebanyak dua periode. Herman menang dalam Pilkada pada

tahun 2010 dan memenangkan kembali pada pilkada pada tahun 2016. Pada periode 2010 – 2015 Herman didampingi oleh wakil wali kota Tobroni Harun. Pada periode 2016 – 2021 Herman didampingi oleh wakil wali kota Yusuf Kohar.

B. Kecamatan Kemiling

Kecamatan Kemiling merupakan bagian dari salah satu kecamatan dalam wilayah kota Bandar Lampung. Kecamatan Kemiling merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan induknya, yaitu Tanjung Karang Barat, yang berdasarkan pada peraturan daerah Nomor 4 tahun 2001 Tanggal 3 Oktober 2001 Tentang Pembangunan, Penghapusan dan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung. Kecamatan Kemiling dipimpin oleh seorang Camat. Camat Kemiling saat ini dijabat oleh Andi Nurdin. Berikut adalah peta wilayah Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung:



Gambar 3. Wilayah Kecamatan Kemiling

Sumber: Kecamatan Kemiling dalam angka tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Kemiling adalah:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Tanjung Karang Barat
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran

Menurut data Badan Pusat Statistik (2013) sebagian besar daerah Kecamatan Kemiling adalah datar berombak (60%), berombak berbukit (25%), dan berbukit bergunung (15%). Kecamatan Kemiling termasuk wilayah beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.000 sampai dengan 3.000 mm setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah Kecamatan Kemiling dibagi menjadi 9 (sembilan) kelurahan, yaitu: (1) Kelurahan Sumber Rejo, (2) Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera, (3) Kelurahan Kemiling Permai, (4) Kelurahan Kemiling Raya, (5) Kelurahan Beringin Raya, (6) Kelurahan Beringin Jaya, (7) Kelurahan Pinang Jaya (8) Kelurahan Sumber Agung, dan (9) Kelurahan Kedaung. Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Kemiling berada di Kelurahan Beringin Jaya.

Masing-masing kelurahan memiliki jumlah penduduk yang berbeda yaitu sebagai berikut:

Tabel 10. Jumlah Penduduk Perkelurahan di Kecamatan Kemiling

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Sumber Agung	3.426
2.	Kedaung	1.350
3.	Pinang Raya	4.448
4.	Beringin Raya	12.342
5.	Sumber Rejo	11.702
6.	Kemiling Permai	13.191
7.	Suber Rejo Sejahtera	5.777
8.	Beringin Jaya	8.300
9.	Kemiling Raya	6.367
Jumlah		66.903

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung tahun 2016

Jumlah penduduk dalam penelitian ini yaitu perkelurahan di Kecamatan Kemiling memudahkan peneliti untuk menentukan sampel responden yang akan diambil pada tiap kelurahan. Jumlah penduduk pada tiap kelurahan berbeda sehingga jumlah sampel responden untuk tiap kelurahan juga berbeda. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kemiling Permai yaitu 13.191 penduduk. Kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kelurahan Kedaung yaitu 1.350 penduduk.

VI. PENUTUP

A. Simpulan

Ketidakharmisan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dengan Wakilnya Yusuf Kohar terjadi tidak lama setelah mereka dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung periode 2016-2021. Sikap permusuhan itu beberapa kali ditunjukkan oleh Herman HN maupun Yusuf Kohar kepada wartawan. Ketidakharmisan yang terjadi dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan pemerintahan Kota Bandar Lampung. Sikap masyarakat terhadap ketidakharmisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung diukur menggunakan tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan konatif.

Sikap Masyarakat Bandar Lampung terutama di Kecamatan Kemiling dengan terjadinya ketidakharmisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Sikap masyarakat Bandar Lampung terhadap ketidakharmisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dari aspek pengetahuan (kognitif) menunjukkan hasil positif dengan persentase 67% mengetahui ketidakharmisan antara Wali Kota dan

Wakil Wali Kota dan sebanyak 33% masyarakat tidak mengetahui ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Sikap masyarakat Bandar Lampung terhadap ketidakharmonisan Keapal Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dari aspek perasaan (afektif) masyarakat menunjukkan hasil negatif dengan persentase 100% masyarakat yang tidak setuju dengan ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali kota.
3. Sikap masyarakat Bandar Lampung terhadap ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dari aspek perilaku (konatif) yaitu tetap mendukung pemerintahan yang menunjukkan hasil positif dengan persentase 74% tetap mendukung pemerintahan walaupun terjadi ketidakharmonisan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan 26% masyarakat tidak mendukung pemerintahan jika terjadi ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran terkait sikap masyarakat terhadap ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yaitu supaya masyarakat dapat memberikan kontribusi yang bersifat positif dan membangun kepada pemerintahan. Kontribusi tersebut dapat berupa saran atau masukan dengan diskusi maupun musyawarah serta tindakan nyata yang dapat ditujukan kepada pemerintah sehingga dapat mengurangi

ketidakharmonisan yang terjadi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung.

2. Adanya konflik *internal* dalam pemerintahan sebaiknya diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak. Tidak mengisyaratkan adanya indikasi pertikaian ke media sehingga tersebar ke publik. Pemimpin Daerah seharusnya bisa memberikan contoh yang positif bagi masyarakat untuk kemajuan daerahnya.
3. Pembagian tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebaiknya dilakukan pada tahap awal perencanaan masa jabatan dan dituangkan ke dalam aturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang pasti. Pemberian batasan yang jelas apabila Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sementara karena keadaan tertentu agar tidak terjadi perubahan kebijakan oleh Kepala Daerah terhadap kebijakan sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah.
4. Untuk menghindari konflik kepentingan dan politik, sebaiknya kedudukan Wakil Kepala Daerah seharusnya ditiadakan atau apabila tetap dipertahankan seharusnya diangkat dari birokrat (sekretaris daerah) yang lebih memahami mekanisme kerja pemerintahan. Sekretaris daerah dapat mewakili kepentingan Kepala Daerah tanpa ada beban kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anas. 2006. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bina Aksara. Jakarta.
- Azwar, S. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Azwar, S. 2016. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hadiwinarto. 2009. *Psikologi (Teori dan Pengukuran)*. Bengkulu: Penerbit Rahman Rahim.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Odd-Helge Fjeldstad. 2003. *Decentralization and Corruption*. (A Review of the literature, Utstein Anti-Corruption Resource Centre). hlm.1.
- Riduwan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali.
- Setiadi, Elly M. 2012. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, Syofian. 2016. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siswanto, Victorianus Aries. 2012. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutrisno Hadi. 1998. *Methodology Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Syarbini, Amirulloh. Dkk. 2011. *Al-Quran dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: PT Gramedia.

Tjipto, Fandi. 1994. *Total Quality Management*. Andi Offset. Yogyakarta.

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Widyastuti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dokumen:

BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2017

BPS Kota Bandar Lampung – Kecamatan Kemiling Dalam Angka 2017

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah

Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Jurnal:

Guyanie, E. E. 2015. *Politik Hukum Pengaturan Jabatan: Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Desentralisasi*.

Haruni, C. W. 2013. *Jurnal Humanity: Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, ISSN 0216-8995

Siregar, R. A. 2016. *Disharmonisasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2008-2013*.

Solihat, Y. dan Nugroho N. 2016. *Jurnal Politikom Indonesiana: Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. ISSN 2528-2069

Taqwa, Z. 2015. *Pecah Kongsi Bupati dan Wakil Bupati Incumbent dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sidoarjo*.

Website:

bandarlampungkota.go.id diakses pada tanggal 4 Agustus 2019 pukul 20:16 WIB

Yusranlapananda.wordpress.com diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 17.36 WIB

<http://www.rakyatpos.com/retaknya-kepemimpinan-kepala-daerah-wakil-kepala-daerah.html/> diakses pada tanggal 13 September 2018 pukul 13.00 WIB

<http://penaberlian.com/wali-kota-herman-hn-dan-wakil-walikota-yusuf-kohar-pecah-kongsi.html> diakses pada tanggal 17 september 2018 pukul 12.53 WIB

<http://lampung.tribunnews.com/2016/02/17.html/> diakses pada 11 Desember 2018 pukul 10.00 WIB

id.wikipedia.org/Alzena2nd diakses pada 2 Agustus 2019 pukul 08.00 WIB

<http://m.lampung.rilis.id/Yusuf-Kohar-Ubah-Kebijakan-Herman-HN-Ini-Salah-Satunya.html> diakses pada 30 Agustus 2019 pukul 09.30

<http://m.lampung.rilis.id/Efektivitas-Kebijakan-Seorang-Yusuf-Kohar.html> diakses pada 30 Agustus 2019 pukul 09.40

<https://lampung17.com/2019/06/17/herman-hn-calonkan-eva-dwiana-maju-dalam-pilwakot-mendatang/> diakses pada 30 Agustus 2019 pukul 09.15 WIB